

KONSTITUSI , LEGISLASI, DAN REGULASI ENERGI HIJAU , ENERGI BARU & TERBARUKAN



Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)

KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TENTANG EBT

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat"

UU 30 Tahun 2007

Energi

UU 21 Tahun 2014

Panas Bumi

UU 10 Tahun 1997

Tentang
Ketenaganukliran

UU 41 Tahun 1999 jo
UU 9 Tahun 2004

Kehutanan

UU 5 Tahun 1990

Konservasi SDA Hayati
dan Ekosistemnya

UU 32 Tahun 2014

Kelautan

UU 27 Tahun 2007 jo

UU 1 Tahun 2014

Pengelolaan Wilayah Pesisir
& Pulau-Pulau Kecil

Pasal 33 ayat 2

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

UU 30 Tahun 2009

Ketenagalistrikan

Pasal 28 H

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.."

UU 32 Tahun 2009

Perlindungan dan
Pengolaan Lingkungan
Hidup

UU 18 Tahun 2008

Pengelolaan
Sampah

UU 16 Tahun 2016

Ratifikasi *Paris
Agreement*

Pasal 23 A

"Pajak & Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

UU 7 Tahun 1983 jo.
UU 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan

UU 10 Tahun 1995 jo.
UU 17 Tahun 2006

Kepabeanan

UU 39 Tahun 2014

Perkebunan

Pasal 23 C

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang"

UU 17 Tahun 2003

Keuangan Negara

Peraturan pelaksanaan turunan dari UU dalam bentuk PP, Perpres, dan Permen serta Perda

REGULASI TERKAIT PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK LISTRIK

UNDANG – UNDANG

1. UU 30/2007 tentang Energi
2. UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
3. UU 21/2014 tentang Panas Bumi
4. UU 16/2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement*

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KESDM
2. PP 79/2014 tentang KEN
3. PP 28/2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
4. PP 7/2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

PERATURAN PRESIDEN

1. Perpres 56/2018 jo Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
2. Perpres 14/2017 jo Perpres 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
3. Perpres 22/2017 tentang RUEN

PERATURAN / KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Permen ESDM 11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
2. Permen ESDM 17/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN
3. Permen ESDM 40/2014 tentang Perubahan Keempat atas Permen 15/2010 tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait PP 79/2014 tentang KEN
4. Permen ESDM 44/2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
5. Permen LHK 46/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan
6. Permen ESDM 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi
7. Permen ESDM 23/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi
8. Permen ESDM 36/2017 tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi
9. Permen ESDM 37/2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
10. Permen ESDM 49/2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
11. Permen ESDM 53/2018 jo Permen ESDM 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
12. Permen ESDM 33/2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
13. Permen ESDM 37/2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Perusahaan Panas Bumi

REGULASI TERKAIT PEMANFAATAN BIOENERGI UNTUK LISTRIK

UNDANG – UNDANG

1. UU No. 30/2007 tentang Energi.
2. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

PERATURAN PEMERINTA

1. PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2. PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

PERATURAN PRESIDEN

1. Perpres No. 3 tahun 2016 jo No. No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
2. Perpres No. 4 tahun 2016 jo No. PerPres No. 14 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).
3. Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
4. Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

PERATURAN / KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Permen ESDM No. 35/2013 jo No. 12/2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.
2. Permen ESDM No. 10/2017 jo No. 49/2017 tentang Pokok–Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
3. Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*).
4. Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Perusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Permen ESDM No. 50/2017 jo No. 53/2018 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Listrik.
6. Kepmen ESDM No. 55/2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2018.

REGULASI TERKAIT PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

UNDANG – UNDANG

1. UU No. 30/2007 tentang Energi.
2. UU No. 39/2014 tentang Perkebunan.

PERATURAN PEMERINTA

1. PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
2. PP No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

PERATURAN PRESIDEN

1. Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
2. PP No. 66/2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 61/2015 Tentang Penghimpunan & Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

PERATURAN / KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL EBTKE

1. Permen ESDM No. 12/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM nomor 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.
2. Permen ESDM No. 41/2018 jo Permen ESDM No. 45/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Kepmen ESDM No. 1770/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 6034/2016 tentang Harga Indeks Pasar BBN (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak.
4. Keputusan Dirjen EBTKE No. 332K/10/DJE/2018 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN Jenis Biodiesel.

PERATURAN LAIN YANG TERKAIT

1. Peraturan Menkeu No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Peraturan Menkeu 152/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS pada Kementerian Keuangan.
3. Peraturan Menkeu No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
4. Peraturan Mendag No. 54/2015 tentang Verifikasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya

UNDANG – UNDANG

1. UU NO. 30/2007 TENTANG ENERGI
2. UU NO. 30/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
3. UU NO. 7/2007 TENTANG SUMBER DAYA AIR
4. UU NO.16/2016 TENTANG KOMITMEN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN PEMERINTA

1. PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
2. PP No. 14/2002 jo PP 23/2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PERATURAN PRESIDEN

1. Perpres No. 56/2018 jo Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
2. Perpres No. 14/2017 jo Perpres 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
3. Perpres No. 22/2017 tentang RUEN
4. Perpres No. 47/2017, Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
5. Perpres No. 194/2014, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas
6. Perpres No. 38/2015, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

PERATURAN / KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Permen ESDM 16/2015, Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang–Bidang Usaha Tertentu di Daerah–Daerah Tertentu pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Permen ESDM 38/2016, Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil
3. Permen ESDM No. 33/2017, Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
4. Permen ESDM No. 12/2018, Perubahan atas Permen ESDM No. 39/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE
5. Permen ESDM No. 49 Tahun 2018, Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
6. Permen ESDM No. 50/2017 Jo 53/2018 Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Pembangkit Listrik
7. Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019–2028

PERATURAN LAIN YANG TERKAIT

1. Permenperin No.54/M–IND/PER/3/2012, Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Permenperin No.5/M–IND/PER/2/2017, Perubahan Atas Permenperin No.54/M–IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Tantangan Pengembangan EBT

NO	MASALAH/TANTANGAN	SEKTOR	KOMISI
1	Pengadaan lahan	Pertanahan	II & V
2	Biaya Investasi Awal	Keuangan	XI & VII & VI
3	Akses kepada teknologi yang efisien	Ristek	VII & VI
4	Akses kepada Infrastruktur jaringan transmisi & distribusi listrik	ESDM	VII
5	Akses kepada pendanaan yang murah	Keuangan	XI & VI
6	Harga Jual / harga keekonomian yang wajar	ESDM	VII & XI
7	Perizinan	Multi Sektor	Kom Yg Terkait
8	Skema Kerja sama (BOOT kurang menarik?)	ESDM	VII
9	Kerja sama & Dukungan internasional	Luar Negeri	I

Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

1

Dasar Hukum & Kebijakan

- Adanya payung hukum dan kebijakan yang dapat memfasilitasi pengembangan program dan investasi energi terbarukan.

2

Finansial

- Mekanisme insentif yang dapat membuat akselerasi pengembangan energi terbarukan.

3

Teknologi

- Terobosan kemajuan teknologi yang efisien dalam proyek Energi Terbarukan

4

Pengembangan Kapasitas

- Peningkatan kemampuan masyarakat dan industri dalam penyediaan dan penggunaan energi terbarukan.

RUU ENERGI TERBARUKAN

SISTEMATIKA RUU EBT

RUU EBT terdiri dari XIV Bab dan 55 Pasal

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- BAB III Penguasaan
- BAB IV Energi Baru
- BAB V Energi Terbarukan
- BAB VI Pengelolaan Lingkungan serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- BAB VII Penelitian dan Pengembangan

SISTEMATIKA RUU EBT (2)

- BAB VIII Harga Energi baru dan Terbarukan
- BAB IX Insentif
- BAB X Dana Energi Terbarukan
- BAB XI Pembinaan dan Pengawasan
- BAB XII Partisipasi Masyarakat
- BAB XIII Ketentuan Peralihan
- BAB XIV Ketentuan Penutup

Pokok–Pokok Isu RUU EBT

1. Terminologi/pemisahan energi baru dan terbarukan.
2. Sumber daya Energi Baru dan sumber daya Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat.
3. Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir.
4. Harga jual.
5. Desain tata kelola.
6. Insentif kepada Badan Usaha dan Pengguna.
7. Disain kebijakan subsidi energi.
8. Dana Energi Baru dan Terbarukan.
9. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.



Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **081315151123**

👉 **www.pushep.or.id**

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

“untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”